

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Masalah yang paling sering dihadapi oleh setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha apapun selalu tidak terlepas dari kebutuhan dana untuk membiayai usahanya. Kebutuhan dana ini diperlukan baik untuk modal investasi atau modal kerja. Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan atau yang sering kita sebut dengan lembaga keuangan memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan dana perusahaan. Hal ini disebabkan karena kegiatan utama lembaga keuangan adalah menyediakan fasilitas pembiayaan dana bagi suatu bidang usaha disamping usaha lainnya seperti menampung uang yang sementara waktu belum digunakan oleh pemiliknya.

Dalam praktiknya lembaga keuangan digolongkan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan lainnya. Menurut Undang-undang RI No.10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah:

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sebagai salah satu lembaga keuangan, bank menyediakan berbagai jasa keuangan, diantaranya adalah memberikan tambahan modal berupa pinjaman finansial dalam bentuk kredit usaha kepada perusahaan atau pihak-pihak yang membutuhkan dana.

Jenis pelayanan kredit yang banyak dilakukan bank adalah kredit untuk usaha kecil. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/2/PBI/2001 tanggal 4 Januari 2001 serta SE Bank Indonesia No.3/9/BKt tanggal 9 Mei 2001, pengertian Kredit Usaha Kecil (KUK) adalah kredit atau pembiayaan dari bank untuk investasi dan atau modal kerja, yang diberikan dalam rupiah dan atau valuta asing kepada nasabah usaha kecil dengan *plafond* kredit keseluruhan maksimum Rp.500.000.000,00 untuk membiayai usaha yang produktif.

Hasil survei pada triwulan I-2005 yang dilakukan terhadap 50 bank umum mengindikasikan adanya peningkatan permintaan kredit masyarakat terhadap perbankan seperti tercermin pada angka neto sebesar 54,5%. Berdasarkan jenis penggunaannya, permintaan kredit baru terbesar dalam bentuk kredit modal kerja (70,7%), diikuti oleh kredit konsumtif (24,4%) dan kredit investasi (4,9%). Hasil survei memperlihatkan bahwa persetujuan pemberian kredit baru bank umum pada triwulan I-2005 mengindikasikan terjadinya peningkatan seperti tercermin pada angka neto sebesar 65,2%. Alasan peningkatan persetujuan pemberian kredit baru dari sisi internal bank adalah tingkat keuntungan yang lebih menarik dibanding penempatan lainnya dan rasio kecukupan modal bank mencukupi, sedangkan dari sisi eksternal bank adalah prospek usaha nasabah membaik dan kondisi ekonomi membaik. (Bank Indonesia, 2005)

Bank BNI 46 Cabang Posindo Bandung sebagai salah satu lembaga keuangan bank juga memberikan berbagai macam layanan kredit. Yang termasuk dalam kategori Kredit Usaha Kecil adalah kredit modal kerja, kredit investasi, kredit kelayakan usaha maksimum dan kredit usaha kecil plus. Kredit Usaha Kecil

yang diberikan oleh Bank BNI 46 Cabang Posindo Bandung diperuntukkan bagi pengusaha kecil yang ingin mengembangkan usahanya dengan persyaratan yang ringan dan prosedur yang sederhana.

Segmen perbankan komersial BNI difokuskan pada layanan bagi sektor usaha kecil dan menengah. Pinjaman untuk sektor usaha mikro dan kecil didukung oleh layanan Sentra Kredit Kecil (SKC). Hingga tahun 2005, BNI telah memiliki 45 SKC yang didirikan di 12 wilayah operasionalnya untuk menangani proses aplikasi, persetujuan sampai penyaluran kredit. Bagi sektor usaha menengah, pinjaman dilayani melalui Sentra Kredit Menengah (SKM) yang juga terdapat di 12 wilayah operasional BNI.

Menurut data intern BNI, jumlah kredit yang disalurkan per 31 Maret 2005 adalah sebesar Rp.58,5 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp.20,8 triliun berupa Kredit Modal Kerja, Rp.10,59 triliun berupa kredit investasi, Rp.10 triliun berupa kredit konsumtif dan Rp.2,4 triliun berupa kredit lain-lain (kredit indikasi, kredit program pemerintah dan kredit lain-lainnya). Sedangkan sisanya sebesar Rp.14,64 triliun disalurkan dalam bentuk valuta asing, yaitu sebesar Rp.5,63 triliun berupa kredit modal kerja, Rp.8,65 triliun berupa kredit investasi, Rp.2,78 triliun berupa kredit indikasi dan Rp.354 miliar berupa kredit untuk karyawan. Dari data diatas dapat dilihat bahwa kredit modal kerja memiliki porsi kredit yang lebih besar yaitu sebesar 45,24% dari total keseluruhan kredit yang disalurkan oleh BNI. (BNI, 2005)

Sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit sampai dengan

kredit dikucurkan. Tahapan-tahapan dalam pemberian kredit ini kita kenal dengan nama prosedur pemberian kredit. Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Apabila dalam penilaian mungkin ada kekurangan, maka pihak bank dapat meminta kembali ke nasabah atau bahkan langsung ditolak.

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat berisiko bagi bank. Calon debitur dapat dengan mudahnya memberikan data-data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan akan sulit untuk ditagih dan menimbulkan kerugian bagi bank.

Seperti yang kita ketahui, setiap bank dalam memberikan kredit kepada masyarakat selalu berusaha untuk menghindari adanya risiko kredit yang diberikan bank kepada masyarakat atau meminimalisasi adanya risiko kredit. Agar dapat meminimalisasi risiko kredit, setiap bank memerlukan pengendalian intern yang baik.

Struktur pengendalian intern pada perusahaan merupakan faktor penting dalam suatu audit. Secara umum pengertian auditing adalah (Mulyadi dan Puradiredja, 1997:7):

Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Apabila struktur pengendalian intern pada perusahaan dirancang dengan baik dan dilaksanakan secara efektif akan mengamankan aset klien dan

menghasilkan data yang dapat dipercaya. Sebaliknya, apabila pengendalian tidak efektif, akan memungkinkan terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan kekayaan perusahaan dan melahirkan informasi keuangan yang tidak bisa dipercaya. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi auditor untuk memahami struktur pengendalian intern agar dapat merencanakan audit yang efektif dan efisien.

Struktur pengendalian intern suatu organisasi terdiri dari kebijakan dan prosedur. Sebagai salah satu bank yang memberikan jasa pemberian kredit, Bank BNI 46 Cabang Posindo Bandung sudah merancang sistem dan prosedur pemberian kredit. Sistem dan prosedur yang diciptakan Bank BNI 46 Cabang Posindo ini diharapkan dapat memberikan jaminan yang memadai agar tujuan organisasi dapat dicapai. Dengan adanya pengendalian intern yang baik, maka pimpinan perusahaan dapat melakukan pengawasan serta pengkoordinasian terhadap seluruh kegiatan perusahaan melalui setiap fungsi yang ada dalam perusahaan sehingga kegiatan operasi perusahaan dapat berjalan dengan efisien dan efektif.

Menurut standar pekerjaan lapangan yang kedua, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern merupakan dasar untuk menentukan jenis dan luas pengujian (*test*) yang dilakukan dalam audit. Karena audit didasarkan atas pengujian, maka dalam setiap pemeriksaan, pemilihan teknik pengambilan sampel menjadi penting. Pemilihan teknik pengambilan sampel dan besarnya sampel (*sample size*) didasarkan atas baik atau tidaknya sistem pengendalian intern yang berlaku dalam perusahaan klien.

Jika dari hasil pemahaman dan pengujian efektivitas pengendalian intern ternyata pengendalian intern dalam perusahaan sangat lemah atau sama sekali tidak ada, tidaklah mungkin bagi auditor untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan klien. Dan jika dari hasil pemahaman dan pengujian efektivitas pengendalian intern auditor menemukan adanya kelemahan-kelemahan didalamnya, maka auditor bertanggungjawab untuk memberitahukan penemuannya tersebut kepada manajemen.

Sesuai dengan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka dalam skripsi ini penulis akan membahas mengenai: Analisis Efektivitas Pengendalian Intern pada Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja di Bank BNI 46 Cabang Posindo Bandung.

1.2.Rumusan Masalah

Peranan bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah kredit. Bahkan pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan utamanya. Oleh karena itu, pengelolaan kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai kepada pengendalian intern kredit.

Pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan yang memiliki risiko bagi bank. Oleh karena itu, Bank BNI 46 Cabang Posindo sebagai salah satu lembaga keuangan yang memberikan pelayanan kredit kepada nasabah juga memiliki pengendalian intern kredit. Pengendalian intern yang ada dalam Bank BNI 46 Cabang Posindo dirancang sedemikian rupa sehingga diharapkan dapat meminimalisasi risiko tidak tertagihnya kredit. Pemahaman yang memadai

mengenai pengendalian intern juga diperlukan untuk menentukan jenis dan luas pengujian yang akan dilakukan dalam audit.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah pengendalian intern pada prosedur pemberian kredit modal kerja di Bank BNI 46 Cabang Posindo Bandung sudah efektif?

1.3.Batasan Masalah

1. Penelitian ini dilakukan terhadap transaksi pemberian kredit modal kerja yang terjadi pada periode 1 Januari 2005-31 Desember 2005.
2. Yang dimaksud dengan Kredit Modal Kerja disini adalah Kredit Modal Kerja yang termasuk dalam Kredit Usaha Kecil. Kredit ini diberikan untuk pembiayaan modal kerja perusahaan, baik perusahaan perorangan maupun yang berbadan hukum dengan *plafond* kredit maksimum Rp. 500.000.000,00.
3. Prosedur pemberian kredit modal kerja dalam penelitian ini dibatasi mulai dari pengajuan permohonan kredit sampai kredit diberikan kepada debitur.
4. Dalam penelitian ini akan dilihat apakah pelaksanaan pengendalian intern dalam prosedur pemberian kredit modal kerja yang ada di Bank BNI 46 Cabang Posindo Bandung telah sesuai dengan karakteristik pengendalian intern menurut Bank Indonesia dalam SEBI No.5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang "Pedoman Pengendalian Intern bagi Bank Umum" yang diadaptasi dari laporan *Committee of Sponsoring Organizations (COSO)* yang berjudul *Internal Control-Integrated Framework* tahun 1992.

5. Kriteria efektif dipenuhi apabila dari hasil pengujian kepatuhan menggunakan model *stop-or-go sampling* terhadap pengendalian intern menunjukkan bahwa $AUPL \leq DUPL$.

1.4. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan pengendalian intern pada prosedur pemberian kredit modal kerja yang diterapkan oleh Bank BNI 46 Cabang Posindo Bandung sudah efektif atau belum.

1.5. Manfaat

1. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan mengenai pengendalian intern pada prosedur pemberian kredit modal kerja dan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki kelemahan yang ada pada pengendalian intern.

2. Bagi penulis

Untuk menerapkan teori-teori yang telah diperoleh khususnya mengenai pengendalian intern kedalam praktik yang sebenarnya.

1.6. Metoda Penelitian

1. Objek penelitian

Penelitian dilakukan dengan studi kasus di Bank BNI 46 Cabang Posindo Bandung.

2. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui wawancara, observasi dan inspeksi. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data mengenai sejarah berdirinya BNI, struktur organisasi, prosedur pemberian kredit modal kerja dan data mengenai pengendalian intern khususnya pengendalian intern kredit.

3. Pengumpulan data

Untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian intern, penulis menggunakan proses pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang menyangkut masalah yang diteliti untuk memperoleh data-data mengenai pengendalian internal dan prosedur pemberian kredit di Bank BNI 46 Cabang Posindo Bandung.

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan untuk mengetahui prosedur pemberian kredit modal kerja secara langsung di Bank BNI 46 Cabang Posindo Bandung.

c. Inspeksi

Inspeksi dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen bank yang terkait dengan prosedur pemberian kredit modal kerja mulai dari pengajuan permohonan kredit, analisis kredit, persetujuan kredit sampai dengan pencairan kredit.

1.7. Analisis Data

1. Analisis kualitatif

Dilakukan dengan cara membandingkan setiap unsur pengendalian intern yang ada pada di Bank BNI 46 Cabaang Posindo Bandung dengan karakteristik pengendalian intern menurut Bank Indonesia dalam SEBI No.5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang “Pedoman Pengendalian Intern bagi Bank Umum” yang meliputi:

- a. pengawasan oleh manajemen dan kultur pengendalian
- b. identifikasi dan penilaian risiko
- c. kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi
- d. sistem akuntansi, informasi dan komunikasi
- e. kegiatan pemantauan dan koreksi penyimpangan.

2. Analisis kuantitatif

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan model pengambilan sampel *stop-or-go sampling*. Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam *stop-or-go sampling*:

a. Menentukan populasi sampling

Populasi yang akan diambil adalah transaksi pemberian kredit modal kerja yang terjadi pada periode 1 Januari 2005-31 Desember 2005.

b. Menentukan *attribute sampling*

Attribute sampling yang akan diuji adalah penandatanganan dokumen yang berkaitan dengan prosedur pemberian kredit modal kerja di Bank BNI 46 Cabang Posindo Bandung.

- c. Menentukan *desired upper precision limit* (DUPL), yaitu penentuan tingkat kesalahan maksimum yang masih dapat diterima dan tingkat keandalan.
- d. Gunakan tabel besarnya sampel minimum untuk pengujian pengendalian guna menentukan sampel pertama yang harus diambil.
- f. Buatlah tabel *stop-or-go decision*.
- g. Evaluasi hasil pemeriksaan terhadap sampel

Pada tahap ini dilakukan perbandingan antara AUPL (*achieved upper precision limit*) dengan DUPL. Jika $AUPL \leq DUPL$ berarti pengendalian intern yang telah diterapkan pada prosedur pemberian kredit modal kerja oleh Bank BNI 46 Cabang Posindo Bandung telah efektif.

1.8.Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metoda penelitian, analisis data dan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang dasar-dasar teoritis yang dipergunakan sebagai landasan penelitian yang dilakukan yang mengacu pada berbagai literatur yang dipakai dalam penelitian.

BAB III: GAMBARAN UMUM BANK BNI 46 CABANG POSINDO BANDUNG

Bab ini membahas tentang gambaran umum perusahaan yang terdiri dari sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisasi perusahaan, prosedur pemberian kredit modal kerja, fungsi-fungsi yang terkait, dokumen dan catatan akuntansi serta *flowchart* prosedur pemberian kredit modal kerja .

BAB IV: ANALISIS DATA

Bab ini membahas tentang perbandingan antara pengendalian intern di Bank BNI 46 Cabang Posindo Bandung dengan karakteristik pengendalian intern yang baik menurut BI, pertimbangan risiko dan juga pengujian pengendalian terhadap prosedur pemberian kredit modal kerja di Bank BNI 46 Cabang Posindo Bandung.

BAB V: KESIMPULAN

Bab ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis data.